



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

Rapat ke	:	11 ( <i>sebelas</i> )
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan PT. Garam (Persero), PT. Perikanan Nusantara (Persero), PT. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)
Hari, Tanggal	:	Senin, 20 April 2020
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan mengenai kondisi Aktual terkait dampak Covid-19, dan 2. Lain-lain.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT. Garam (Persero), Budi Sasongko; 3. Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Persero), M. Yana Aditya; 4. Direktur Utama PT. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Farida Mokompit; 5. Direktur Utama Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Chairul Zaman; dan 6. Direktur Utama PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero), M Kuncoro Wibowo, beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 15.49 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 20 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) untuk segera menyusun strategi antisipasi kelangkaan bahan pangan akibat dampak pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya daerah rawan pangan yang perlu diprioritaskan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Komisi VI DPR RI meminta PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) untuk melakukan pemetaan serta membuat simulasi dampak Covid-19 terhadap ketersediaan pangan di Indonesia baik simulasi dampak ringan, menengah maupun berat dalam berbagai jangka waktu sehingga dapat dilakukan respon untuk tiap periode atas dampak yang dihadapi.
3. Komisi VI DPR RI meminta Komisi VI DPR RI meminta PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) memastikan kecepatan dan ketepatan distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang berlangsung.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Garam (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk membuat analisa yang tepat baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menghitung berapa kebutuhan pangan dalam negeri dengan cara mengoptimalkan penyerapan produksi bahan pangan dalam negeri sebelum melakukan impor, selanjutnya jika ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh impor bahan pangan, maka diprioritaskan BUMN Pangan.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Garam (Persero) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk memanfaatkan potensi garis pantai yang terpanjang di dunia sebagai sumber bahan baku garam sehingga Indonesia mampu melakukan ekspor garam ke kawasan Asia Pasifik sebagai antisipasi pembukaan lapangan kerja sehubungan kemungkinan krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan Lembaga Negara lainnya supaya produksi ikan menjadi cadangan protein pangan nasional sebagai pengganti beberapa protein pangan impor seperti daging selama pandemi covid-19.
7. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Perum Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Perikanan Nusantara (Persero) untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor produk perikanan setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri.
8. Komisi VI DPR RI meminta PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) untuk berpartisipasi secara aktif dalam program stimulus pemerintah dan meningkatkan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan usaha, produksi, dan bahan kebutuhan pokok lainnya di tengah kondisi pandemi Covid-19.

9. Komisi VI DPR RI meminta PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) untuk membuat peta *suplay chain* di Indonesia dan meningkatkan kapabilitasnya sehubungan masih mahal biaya logistik di Indonesia.
10. Komisi VI DPR RI meminta BUMN pangan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi.

### III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 19.53 WIB.

Jakarta, 20 April 2020  
**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI**  
**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**ARIA BIMA**  
**A-189**